

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ibnu (1994 : 29), bahwa pembangunan daerah adalah proses perubahan sistem yang direncanakan menuju ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial-ekonomis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Pada umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintah pusat, dan hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Hal ini akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan Ibnu (1994 : 222). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Siti (2010 : 46) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam PAD yang harus dikembangkan karena jumlah kontribusinya yang cukup besar. Salah satu jenis pajak daerah yang

merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua jenis pajak ini merupakan pajak daerah yang berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya disetiap daerah terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua (Nani, 2015).

Secara teoritis, besarnya pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil (Pande, 2013). Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap, sedangkan PDRB per kapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2015). Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan PDRB per kapita dapat meningkatkan kemampuan masyarakat yang akan mempengaruhi minat atau daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat meningkatkan pula pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah maka akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Marihot (2013 : 209) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah “Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya (Halim, 2008 : 128). Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Oesi, 2015).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014 ?
2. Apakah PDRB per kapita mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014 ?
3. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014 ?
4. Apakah PDRB per kapita mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penilaian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Timur selama 2013-2014.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan di waktu yang akan datang untuk meningkatkan PDRB per kapita dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih tinggi dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat berdampak baik yaitu untuk menekan laju peningkatan volume kendaraan yang dapat mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan di jalan raya.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi pemerintahan. Dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan hasil dari penelitian ini.

## 3. Bagi Lembaga STIE Perbanas Surabaya

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Sekolah Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab, dan dapat digunakan oleh pembaca untuk dapat mengulas masalah yang ada dalam penelitian ini dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula Landasan Teori yang berkaitan dengan Akuntansi Perpajakan yang mendasari penelitian ini, Kerangka Pemikiran, serta Hipotesis Penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Rancangan penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data yang digunakan.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini memberikan gambaran tentang populasi dan aspek dari sampel yang akan diteliti. Selanjutnya penjelasan tentang analisis dari hasil penelitian dan menjelaskan hasil penelitian yang mengarah pada pemecahan masalah dan hasil uji hipotesis.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan Penelitian yang menggambarkan kekurangan dari penelitian, dan Saran untuk peneliti selanjutnya.

